

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MELALUI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Sri Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
younai@yahoo.com

Isti Fadah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
istifadah1966@gmail.com

Diana Sulianti Tobing

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
dskltse@yahoo.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the influence of human resource competency and utilization of information technology on the financial statement quality mediated by the local property management in the Government of Bondowoso Regency. This is a quantitative research with the population consists of all property administrators, operators of Local Management Information System (SIMDA)/financial report makers, and Financial Administration Officials (PPK). Sampling method used is saturated sampling (census). Data used were collected from questionnaires distribution and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). Results of the research prove that human resource competency affects local property management and financial statement quality, while utilization of information technology only affects financial statement quality, but it has no effect on local property management. In addition, local property management affects financial statement quality. These mean that local property management partially mediates the influence of human resource competency on financial statement quality, but it does not mediate the influence of utilization of information technology on financial statement quality.*

Keywords: *Human Resource Competency, Utilization of Information Technology, Management of Local Property, and Quality of Financial Statement.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dimediasi oleh pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh pengurus/penyimpan barang, operator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)/pembuat laporan keuangan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Pengambilan sampel menggunakan *sampling* jenuh (*sensus*). Data yang digunakan adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner dan diolah menggunakan SEM. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi hanya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, pengelolaan barang milik daerah terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ini berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah memediasi secara parsial pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan.

Pendahuluan

Wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterima secara umum (Nordiawan *et al.*, 2012:15). Laporan keuangan pemerintah diaudit dan mendapatkan penilaian berupa pendapat atau opini dari BPK (Nordiawan *et al.*, 2012:173). Ada empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa menurut UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, yakni opini: wajar tanpa pengecualian/*unqualified opinion*, wajar dengan pengecualian/*qualified opinion*, tidak wajar/*adverse opinion*, pernyataan menolak memberikan opini/*disclaimer of opinion* (UU 15, 2004). Penilaian tertinggi diberikan oleh BPK terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa LKPD tersebut sudah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Salah satu indikasi terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat dari opini atas LKPD yang diperoleh. Dasar pertimbangan utama BPK (Badan Pemeriksa keuangan) memberikan opini atas LKPD adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah disinyalir merupakan salah satu indikator tercapainya LKPD yang berkualitas. Pengelolaan barang milik daerah yang andal membutuhkan sinkronisasi dari kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas tersebut.

Berbagai fenomena terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Kompetensi sumber daya manusia ini berperan sangat penting dan layak diperhitungkan, namun faktanya tidak lebih dari 10 orang pelaksana yang mengurus barang milik daerah memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Keberadaan sistem aplikasi dinilai belum efisien dan efektif karena SIMDA BMD

versi 2.0.2 belum sepenuhnya menyajikan laporan BMD secara utuh (komprehensif) dan masih terbatas dalam menyajikan penyusutan aset tetap. Pengelolaan barang milik daerah juga masih memunculkan permasalahan yang terjadi pada tahun 2012-2015, seperti: nilai aset belum seluruhnya dapat diuji; aset tidak dilengkapi dokumen pendukung bukti kepemilikan; pengamanan aset yang belum memadai dan sebagainya seperti termuat dalam LHP BPK RI (2013-2016). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan barang milik daerah. Namun di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2012, 2014, dan 2015 yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah cukup berkualitas.

Hipotesis yang dibangun pada penelitian ini yaitu (1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah? ;(2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah?; (3) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?; (4) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?; (5) Apakah pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Populasinya adalah pengurus/penyimpan barang, operator SIMDA/pembuat laporan keuangan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus). Data yang digunakan adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner, dan diolah menggunakan *Structural Equational Modelling* (SEM). Sebaran populasi responden dan definisi operasional variabel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sebaran Populasi di OPD Pemkab. Bondowoso

Jenis OPD	Jumlah OPD	Jumlah Populasi
Badan	7	$7 \times 3 = 21$
Dinas	15	$15 \times 3 = 45$
Kecamatan	23	$23 \times 3 = 69$
Inspektorat	1	$1 \times 3 = 3$
RSUD	1	$1 \times 3 = 3$
Satuan Polisi Pamong Praja	1	$1 \times 3 = 3$
Sekretariat DPRD	1	$1 \times 3 = 3$
Sekretariat Daerah (8 Bagian)	1	$1 + (8 \times 2 = 16) = 17$
Jumlah	50	164

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, 2017 (diolah)

Hasil dan Pembahasan

Uji Instrumen Penelitian

Pengujian pertama dilakukan melalui *pilot test* pada 20 sampel responden terpilih secara acak dengan 36 indikator. Uji validitas dilakukan dengan *korelasi bivariate* masing-masing skor indikator dengan skor konstruk (Ghozali, 2011:52-54). Hasil perhitungan uji validitas dengan membandingkan nilai r hitung $>$ r tabel, dan nilai p -value $<$ α (0,05) menunjukkan bahwa item indikator X2.7 memiliki nilai r hitung sebesar 0,408 dan p -value 0,217; dan Z.7 memiliki nilai r hitung 0,462 dan p -value 0,074 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dilakukan pengujian reliabilitas pada item indikator lainnya yang dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $>$ 0,7 (Ghozali, 2011:47-48 sebagaimana Nunnally, 1994) diperoleh hasil bahwa seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,848 sampai dengan 0,924 yang berarti lebih dari 0,700 dengan jumlah pertanyaan 34 butir sehingga dinyatakan reliabel.

Pengujian akhir (*final test*) dilakukan pada seluruh populasi sejumlah 157 responden yang mengembalikan kuesioner dan dapat diolah dengan 34 indikator. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item indikator dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Structural Equation Modelling

Uji normalitas multivariat dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka nilai *Critical Ratio* (CR) yang berada diantara -1,96 sampai dengan 1,96 ($-1,96 \leq CR \leq 1,96$) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun secara multivariat (Dimiyati, 2009:135 mengutip pernyataan Ghozali, 2005:128).

Hasil uji normalitas diperoleh nilai absolut CR sebesar -0,281 yang berarti lebih kecil dari nilai 1,960 dengan tingkat kepercayaan 95% (α 5%), data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan data terdistribusi normal.

Uji multikolinieritas melihat nilai *Condition Number* (CN). Nilai CN yang besar atau melebihi 30 menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multikolinieritas atau singularitas, nilai CN > 30 menunjukkan adanya kolinieritas moderat hingga berat (Kuntoro, 2014:104). Hasil pengujian diperoleh nilai CN sebesar 20,080 yang bernilai lebih kecil dari 30, sehingga disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam data penelitian.

Uji outliers menggunakan kriteria berdasarkan nilai *Chi-square* pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada tingkat signifikansi $p < 0,01$. Kasus yang mempunyai nilai *mahalanobis distance* lebih besar dari yang diisyaratkan, maka kasus tersebut adalah multivariate outliers (Ghozali, 2014:227). Penelitian ini menggunakan nilai *Chi-square* dengan derajat bebas 34 (jumlah indikator variabel) pada tingkat signifikansi 1%, sehingga diperoleh nilai *mahalanobis distance* $\chi^2 = \text{CHIINV}(0,05;34)$ adalah 56,061. Hasil pengujian outliers khususnya pada 10 observasi dengan nilai *Mahalanobis d-squared* menunjukkan bahwa nilai *Mahalanobis d-squared* terbesar adalah 54,457, sedangkan pada kolom p1 dan p2 tidak terdapat observasi yang mempunyai nilai kurang dari 0,01. Nilai *Mahalanobis d-squared* terbesar 54,457 < nilai *Chi-square* (*Chi-square Distribution Table*) sebesar 56,061, yang berarti bahwa data dalam penelitian tidak mengandung outlier.

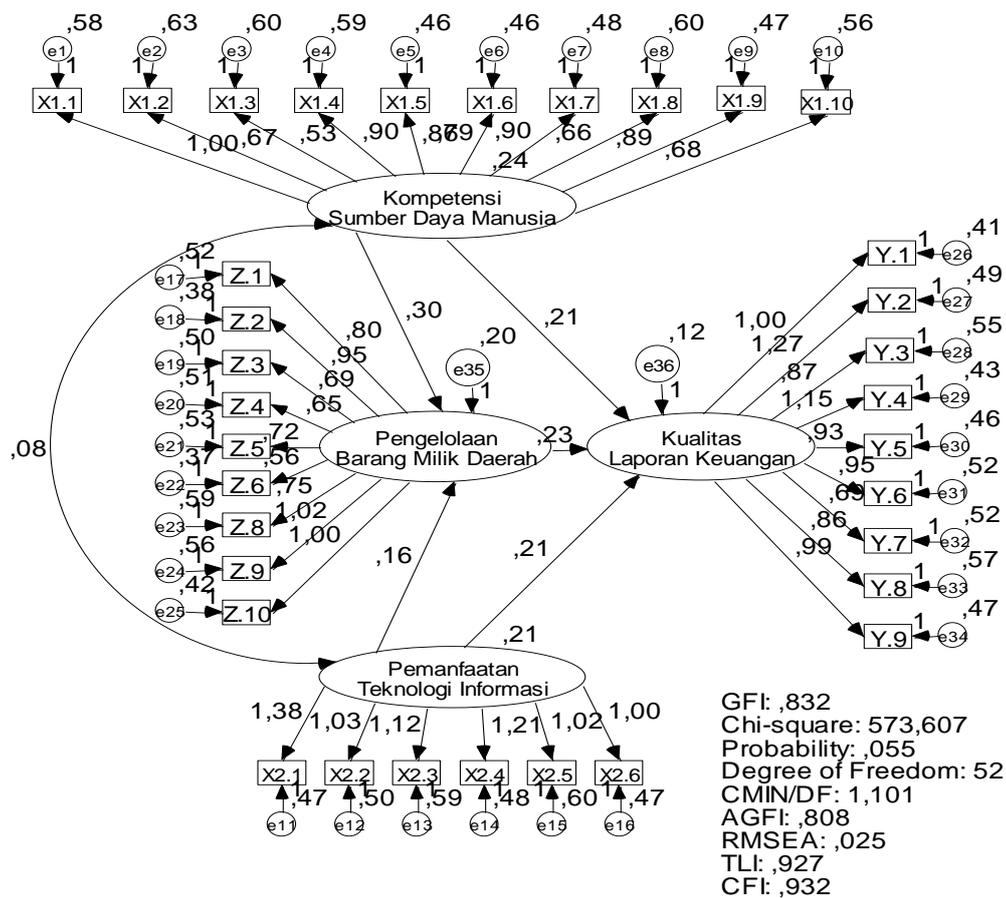
Hasil uji kesesuaian model disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Kesesuaian Model

Goodness of Fit Index	Cut of Value	Hasil	Keterangan
Chi-square	$\leq 575,208$ (nilai tabel untuk $\alpha = 5\%$, $df = 521$)	573,607	Baik
Probability	$> 0,05$	0,055	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,101	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,832	Marginal
AGFI	$\geq 0,90$	0,808	Marginal
TLI	$\geq 0,90$	0,927	Baik
CFI	$\geq 0,90$	0,932	Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,025	Baik

Sumber: Output SEM

Model persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel laten disajikan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Hasil Analisis Model SEM

Sumber: Output SEM

Gambar 1 menunjukkan hasil uji konstruk model yang dievaluasi berdasarkan *goodness of fit index*. Berdasarkan nilai yang diperoleh pada tabel 3, diperoleh nilai-nilai: $\chi^2 = 573,607$, $p = 0,055$, $CMIN/DF = 1,101$, $GFI = 0,832$, $AGFI = 0,808$, $TLI = 0,927$, $CFI = 0,932$ dan $RMSEA = 0,025$. Dari delapan kriteria yang digunakan untuk menilai layak/tidaknya suatu model, terdapat enam kriteria terpenuhi dan dua kriteria marginal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang menjadi acuan persamaan model struktural sudah sesuai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model struktural dapat diterima karena ada kesesuaian antara model dengan data.

Hasil uji kausalitas disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas

Variabel	Koefisien			Keterangan
	Estimasi	C.R.	p-value	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁) → Pengelolaan Barang Milik Daerah (Z)	0,297	2,398	0,016	Signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂) → Pengelolaan Barang Milik Daerah (Z)	0,163	1,327	0,185	Tidak Signifikan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,208	2,016	0,044	Signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,206	1,973	0,049	Signifikan
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Z) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,227	2,234	0,026	Signifikan

Sumber: Ouput SEM

Pengujian hipotesis ini adalah dengan menganalisis nilai C.R dan nilai *p-value* dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu nilai CR > 1,96, dan nilai *p-value* < 0,05, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima.

Penelitian ini mengajukan lima hipotesis. Hasil uji dari tiap-tiap hipotesis disajikan secara ringkas pada tabel 5 berikut:

Tabel 4. Kesimpulan Hipotesis

	Hipotesis	Hasil Uji
H ₁	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah.	Diterima
H ₂	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah.	Ditolak
H ₃	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Diterima
H ₄	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Diterima
H ₅	Pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Diterima

Sumber: Output SEM, diolah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia akan mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, dan sebaliknya semakin rendah

kompetensi sumber daya manusia yang ada akan menurunkan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Haryanto (2013) bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Simamora *et.al.* (2012) yang menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang berpengetahuan dan bertanggung jawab mempengaruhi pengelolaan aset di daerah pasca pemekaran.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh aparatur pelaksana yaitu pengurus barang dibantu dengan penyimpan barang, dan didampingi Pejabat Pengelola Keuangan (PPK). Diketahui sebesar 51,59% responden bergelar S1 dan S2 dari berbagai latar belakang pendidikan. Sebesar 49,8% responden juga sering dan sangat sering membekali dirinya dengan mengikuti kursus/bimtek/pelatihan tentang pengelolaan BMD/keuangan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aparatur pelaksana telah sering melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan barang milik daerah dengan dinas pengelola yaitu Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso. Hal inilah yang meminimalisasi tingkat kesalahan sekaligus mengoptimalkan peran sumber daya manusia dalam mengelola barang milik daerah di Kabupaten Bondowoso.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang ada maka pengelolaan barang milik daerah semakin memburuk, sebaliknya dengan menurunnya pemanfaatan teknologi informasi maka pengelolaan barang milik daerah semakin membaik. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Darno (2012) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Demikian juga penelitian Nuryamin (2016) yang menyatakan bahwa wujud dari pemanfaatan teknologi informasi adalah menggunakan SIMDA untuk mengatasi permasalahan pengelolaan barang milik daerah.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7. yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso masih belum termanfaatkan secara maksimal. Peneliti berpendapat, kendala pertama adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Hal ini dikarenakan tidak semua pengurus barang/yang mengoperasikan sistem tersebut

benar-benar mampu dan memahami aplikasi yang ada, akibatnya penerapan aplikasi ini justru memperlambat (*output*) pelaporan dalam pengelolaan barang milik daerah. Kendala kedua, aplikasi ini masih terus-menerus diperbarui, sehingga membingungkan dalam pengoperasiannya. Kendala ketiga, lemahnya kesadaran dan niat dari sumber daya manusia itu sendiri untuk memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Adanya keterbatasan teknologi informasi tersebut mengakibatkan seringnya digunakan program manual dalam mengelola barang milik daerah.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan sebaliknya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia yang ada akan menurunkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti Nuryanto *et al.* (2013) dan Indriasih *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Operator SIMDA/penyusun laporan keuangan adalah sumber daya manusia yang bertugas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Latar belakang pendidikan di bidang ekonomi tentunya sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Data responden menunjukkan hanya 24,20% yang berlatar pendidikan di bidang ekonomi/akuntansi/manajemen, namun 51,59% responden diketahui bergelar S1 ataupun S2. Artinya, responden telah cukup mampu mengerti dan memahami berbagai tuntutan akuntansi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Semua ini menyadari pentingnya akuntansi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Di pihak pengelola, yaitu Bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso telah sering mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis, serta forum-forum terbuka lainnya bagi para operator SIMDA/penyusun laporan keuangan guna mengatasi ketidakpahaman dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan di instansi terkait, yaitu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah juga mendukung para operator SIMDA/penyusun laporan keuangan untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang ada maka laporan keuangan akan semakin berkualitas, sebaliknya dengan menurunnya pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan menurun juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuryanto *et al.* (2013) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian Suwanda (2014) juga mendukung bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso menggunakan aplikasi SIMDA KEU Versi 2.7.0.11. dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aplikasi ini digunakan untuk membantu menghasilkan laporan keuangan, mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi, sampai dengan pelaporannya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sampai dengan sejauh ini tidak ada permasalahan berarti dalam penggunaan program ini. Berbagai kesulitan yang ada mampu diatasi pengguna dengan bantuan dari pihak pengelola. Perkembangan selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso juga telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa apabila pengelolaan barang milik daerah sudah baik maka laporan keuangan akan semakin berkualitas, sebaliknya pengelolaan barang milik daerah tidak optimal maka kualitas laporan keuangan akan menurun juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anshari dan Efrizal (2016) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif pengelolaan aset daerah terhadap laporan keuangan. Simamora *et al.* (2012) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah, dan faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bangun (2015) mengungkapkan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat memediasi hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah melakukan berbagai upaya untuk terus membenahi kondisi aset, seperti: pengamanan atas aset tanah berupa pengurusan sertifikat kepemilikan tanah, penelusuran bangunan yang menjadi hak pemerintah daerah, penelusuran aset kendaraan dinas baik secara fisik maupun dokumen, ataupun menindaklanjuti usulan penghapusan atas aset-aset yang tidak layak dioperasikan. Pengelolaan barang milik daerah sudah menerapkan penyusutan aset tetap sejak penerapan akuntansi berbasis akrual diberlakukan pada tahun 2015. Baik buruknya pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator ketika permasalahan aset menjadi salah satu penyebab opini laporan keuangan untuk tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2012, 2014, 2015, dan yang terbaru di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menciptakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang tertib demi memutakhirkan informasi dalam penyajian aset tetap di neraca pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Peran mediasi dapat dilihat berdasarkan nilai *variance account for* (VAF). Pemediasi full (*full mediation*) apabila nilai VAF > 80%, pemediasi parsial (*partial mediation*) apabila nilai VAF berkisar antara 20% - 80 %, sedangkan jika nilai VAF < 20% hampir tidak ada efek mediasi (Hair *et. al.*, 2013 dalam Sholihin *et. al.*, 2014:82). Nilai VAF dapat dihitung sebagai berikut:

$$VAF = \frac{\text{pengaruh tidak langsung}}{\text{pengaruh langsung} + \text{pengaruh tidak langsung}}$$

Berdasarkan formula di atas, dapat diketahui bahwa:

1. nilai VAF antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan barang milik daerah adalah sebesar 24,36% menunjukkan peran sebagai pemediasi parsial (*partial mediation*).
2. nilai VAF antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan barang milik daerah adalah sebesar 15,23% menunjukkan bahwa tidak ada efek mediasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah hanya memediasi pengaruh (berperan sebagai pemediasi parsial) antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan, namun tidak

memediasi pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (a) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah, semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka pengelolaan barang milik daerah semakin baik; (b) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah, artinya semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi tidak berdampak dalam pengelolaan barang milik daerah; (c) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka laporan keuangan akan semakin berkualitas; (d) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin dimanfaatkannya teknologi informasi maka laporan keuangan akan semakin berkualitas; (e) Pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dengan semakin baik pengelolaan barang milik daerah maka kualitas laporan keuangan akan meningkat; (f) Pengelolaan barang milik daerah merupakan mediasi parsial (*partial mediation*) dalam pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi bukan mediator dalam pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran

Peneliti memberikan saran antara lain:

1. Bagi pengurus dan/atau penyimpan barang, serta operator SIMDA/penyusun laporan keuangan: disarankan untuk lebih intensif dalam mengikuti kursus, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis, serta forum-forum terbuka lainnya di bidang keuangan atau pengelolaan barang milik daerah, ataupun teknologi informasi.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, peneliti menyarankan untuk:

- a. memberikan *rewards* khusus kepada pengurus dan/atau penyimpan barang, serta operator SIMDA/penyusun laporan keuangan di luar honor/insentif yang sudah diterima selama ini.
 - b. menjadikan SIMDA BMD lebih lengkap, akurat, dan komprehensif agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya, sekaligus mengkondisikan pentingnya integrasi antara aplikasi SIMBA BMD serta SIMDA KEU.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel dan indikator-indikator baru untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan mediasi pengelolaan barang milik daerah.

Daftar Referensi

- Anshari, dan Efrizal Syofyan. 2016. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik* Vol. 4 No. 1 (2016) Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Bangun, Variana. 2015. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
- BPK RI. 2013-2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso*.
- Darno. 2012. Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*. Vol. 1 No. 1: Semester Ganjil 2012/2013.
- Dimiyati, Mohamad. 2009. *Analisis SEM dalam Uji Pengaruh Beberapa Variabel terhadap Loyalitas Kajian Berbasis Riset pada Debitur Kredit Usaha Kecil*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Medika.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2014. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 22.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto. 2013. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: UNDIP Press Semarang.
- Indriasih, Dewi, dan Poppy Sofia Koeswayo. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and The Effectiveness of Government Internal Control Toward The Quality of Financial Reporting and Its Impact on The Performance Accountability in Local Government (Survey of All Units Local Government in Tegal City – Central Java Province – Indonesian). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol.5, Issue 1 (Des) ISSN 2289-1560.
- Kuntoro, H. 2014. *Teori dan Aplikasi Analisis Multivariat Lanjut*. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nuryamin, Syufri. 2016. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. *Jurnal Naskah Publikasi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Nuryanto, Muhamad, and Nunuy Nur Afiah. 2013. The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on

- Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province – Indonesia). *World Review of Business Research* Vol. 3. No. 4. November 2013 Issue. Pp. 157- 171.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Sholihin, Mahfud, Dwi Ratmono. 2014. *Analisis SEM - PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Simamora, Rudianto, dan Abdul Halim. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 10. Nomor 01. Maret 2012.
- Suwanda, Dadang. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Mendapatkan Opini WTP dari BPL (Survey pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta di Wilayah Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.